

INDONESIA POROS MARITIM DUNIA: MENGEMBANGKAN KEAMANAN NASIONAL MELALUI PERSPEKTIF KERJASAMA PERTAHANAN DI KAWASAN

INDONESIA GLOBAL MARITIME FULCRUM: DEVELOPING NATIONAL SECURITY THROUGH THE PERSPECTIVE OF DEFENCE COOPERATION IN THE REGION

Kurniawan Firmuzi Syarifuddin¹, Deni Dadang A.R.², Emi Nurcahyani³, Lukman Yudho Prakoso⁴

^{1,2,4} PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA, FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

³DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

(Kurniawansyarifuddin@gmail.com, denidar87akmil@gmail.com, emi.nurcahyeni@gmail.com, lukman.prakoso@idu.ac.id)

Abstrak – Konsep Poros Maritim Dunia di sampaikan oleh Joko Widodo pertama kali pada saat berkampanye dalam rangka konstetasi pilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014, semenjak itu telah menjadi visi pembangunan selama 10 tahun sampai dengan tahun 2024 dan juga menjadi muara bagi komitmen bersama ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP). Walaupun dalam AOIP tidak menyatakan bahwa bidang Pertahanan menjadi salah satu area kerjasama, akan tetapi mewujudkan keamanan di kawasan akan berimbas kepada keamanan nasional masing-masing negara di kawasan. Dalam menyusun strategi pertahanan negara tidak bisa dilepaskan pengaruh dari keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menyebabkan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut, beserta seluruh potensi yang terkandung didalamnya, juga harus dapat mewartakan upaya peran serta Indonesia secara nyata untuk berkiprah secara langsung di kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci: AOIP, ASEAN, Indo-Pasifik, Keamanan Nasional, Maritim, Pertahanan, Wilayah Pertahanan

Abstract – Global Maritime Fulcrum concept was first conveyed by Joko Widodo during his campaign for presidential election contest in 2014. Since then, it has become his development vision for 10 years until 2024 and become an estuary for ASEAN's collective commitment as ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP). Eventhough AOIP does not state defence field as one of areas of cooperation, pursuing security in the region will have impacts on each national security. Constructing national defence strategy will be influenced by the security in the Indo Pacific region. Hence, empowerment maritime defence along with its potential shall also address Indonesia's real effort and direct contribution in the Indo Pacific region.

Keywords: AOIP, ASEAN, Defence, Defence Territory, Indo-Pacific, Maritime, National Security

Pendahuluan

Pada saat kampanye untuk kontestasi Calon Presiden RI tahun 2014, Joko Widodo yang merupakan salah satu kandidat menyampaikan gagasan

tentang pengembangan ekonomi berbasis maritim dalam rangka terciptanya kesejahteraan yang disebut dengan Poros Maritim Dunia (PMD). Ketika terpilih menjadi Presiden Republik

Indonesia ke-7, gagasan ini kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang akan dilakukan selama menjabat dan kemudian dilanjutkan ketika terpilih untuk masa bakti periode ke-2 pada periode tahun 2019-2024. Visi pembangunan ini tidak saja merubah paradigma negeri yang memiliki wilayah maritim hampir mencapai 7 juta kilometer persegi yang selama ini telah memungguni kodratnya, akan tetapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai jalur ekonomi global dan jalur keamanan laut internasional (Syahrin, 2018).

PMD ini tidak saja menjadi visi dari pembangunan Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akan tetapi ketika disampaikan pertama kali pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur/East Asia Summit 2014 di Naypydaw-Myanmar dan pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok-Thailand telah dijadikan muara bagi komitmen bersama dari para negara-negara anggota ASEAN sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) atau cara pandang ASEAN dalam posisinya di kawasan Indo-Pasifik (Anwar, 2020). Melalui AOIP, ASEAN akan menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan sejahtera, dengan ASEAN

mengambil posisi sebagai pusat dan pemimpin dari seluruh kegiatan yang dilakukan, melalui prinsip keterbukaan, inklusif, transparan dan menghormati hukum internasional. ASEAN juga akan menjembatani dan mempersatukan kepentingan antar kawasan, tidak saja di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga kawasan Pasifik Selatan dan juga kawasan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

Diterimanya AOIP menandakan semakin kuatnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN, tidak saja dalam membentuk kerjasama di bidang Ekonomi, tetapi juga di bidang Keamanan Regional sebagai inti pokok kerjasama tersebut. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mempelajari bagaimana kerjasama AOIP ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama di bidang pertahanan, sehingga diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat membawa pengaruh positif kepada pengembangan pertahanan negara Indonesia secara keseluruhan, terutamanya terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif

fenomenologi, dimana peneliti akan menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori (Helaluddin, 2018). Dengan peneliti menilai bahwa terdapat hubungan antara AOIP harus dijabarkan secara lebih spesifik dalam hal kerjasama multilateral di bidang pertahanan, sehingga akan tercipta keamanan regional yang berdampak pada keamanan nasional suatu negara di kawasan, yang kemudian mempengaruhi pada pemberdayaan wilayah pertahanan laut di Indonesia.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Dokumentasi serta wawancara mendalam dengan teknik penentuan narasumber berupa *purposive sampling*. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data serta sumber literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data inilah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian

Sudut Pandang bidang Pertahanan dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)

Kawasan Indo-Pasifik yang berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah lama menjadi fokus perhatian dan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan besar di dunia, sejak Perang Dunia I ketika Jepang merebut wilayah pendudukan Jerman di China dan Pasifik, sampai dengan ketika konflik di Laut China Selatan semakin memanas pada beberapa tahun kebelakang. Secara berturut-turut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di tahun 2007, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tahun 2011 dan kemudian Presiden China Xi Jinping di tahun 2013, menyampaikan kebijakan negaranya masing-masing dalam memfokuskan perhatian dan memperluas pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, melalui program kerjasama di bidang Ekonomi dan juga Militer (Yani et al., 2015). Seluruh negara memandang bahwa kawasan Indo-Pasifik sangat strategis berdasarkan pertimbangan geopolitik oleh karena merupakan rute pelayaran dengan nilai perdagangan yang sangat besar, akses menuju pasar dari barang-barang produksi negaranya dan juga sebagai akses ke sumber daya yang sangat besar di kawasan tersebut. ASEAN, terutamanya Indonesia, yang menjadi pusat persilangan kawasan Indo-Pasifik tidak mau sebagai pihak yang

tidak terlibat secara langsung dalam perkembangan strategis yang sangat dinamis dengan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia yang saling bersaing. Pada akhirnya atas upaya keras diplomasi Indonesia dan kesepakatan seluruh negara ASEAN, AOIP pada akhirnya menjadi suatu komitmen dalam melakukan kerjasama secara inklusif di kawasan Indo-Pasifik yang terdiri dari (1) kerjasama Maritim; (2) konektivitas; (3) UN SDGs 2030; dan (4) kerjasama di bidang Ekonomi dan potensi kerjasama di bidang terkait lainnya (Yanuarti et al., 2020). Melalui kerjasama ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan untuk melakukan kerjasama bagi kepentingan bersama dalam menopang kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di kawasan (Aulia et al., 2019). Walaupun secara spesifik kerjasama di bidang pertahanan tidak disebutkan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan, akan tetapi didalam AOIP disebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan berbagai diskusi strategis tentang permasalahan ini dan berbagai bentuk kegiatan kerjasama yang bersifat prakek dimungkinkan untuk dapat dilakukan pada suatu mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN. Keinginan ASEAN

untuk membangun kerjasama di bidang pertahanan di kawasan Indo-Pasifik sama sekali bukan untuk menjadikan semacam persaingan untuk merebut pengaruh dengan negara-negara lain yang juga memiliki pandangan serupa, oleh karena hal ini justru akan menimbulkan dilema dan ketidakstabilan di kawasan, yang dapat berakibat buruk dalam pembangunan kesejahteraan kawasan (Damayanti, 2019). Apabila ditelaah lebih lanjut, bahwa AOIP tidak bertujuan untuk bertujuan untuk membentuk suatu bentuk kerjasama yang baru, termasuk di bidang pertahanan. Apabila bentuk kerjasama Asia Timur (*East Asia Summit*) dijadikan sebagai *platform* ideal yang akan mengimplementasikan bentuk kerjasama dimaksud, maka ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) yang sejak tahun 2010 telah berhasil mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di kawasan dapat dijadikan sebagai inti dari bentuk kerjasama AOIP di bidang pertahanan.

Upaya untuk membangun kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik tidak bisa dilepaskan dari “persetujuan” negara-negara besar, dimana arah kebijakan strategis dalam rangka mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut

tidak dapat didikte oleh ASEAN (Sukmadewi, 2020). ASEAN sendiri sampai sekarang dapat dikatakan masih belum dalam satu kesatuan yang utuh, oleh karena masih menghadapi berbagai macam tantangan yang beragam, atau *multi-faceted challenges* yang tidak dapat dihindari, termasuk diantaranya adalah menjadi kepanjangan dari kepentingan nasional negara-negara besar dunia (Natalegawa, 2013). Walaupun pembentukan kerjasama pertahanan di kawasan Indo-Pasifik akan mengalami hambatan, akan tetapi hal ini harus terus diupayakan, hal ini sejalan dengan teori *Regional Security Complex* yang menyatakan bahwa keamanan di suatu kawasan tidak bisa dilepaskan dari pola interaksi keamanan yang berbeda dan stabil diantara pihak yang terlibat dan akan berimbas signifikan terhadap keamanan suatu negara dalam kawasan tersebut (Buzan, 2003).

Diharapkan ADMM *Plus*, yang merupakan forum kerjasama praktis di bidang pertahanan antara ASEAN dan 8 negara mitra dialognya dan telah berlangsung sejak tahun 2011, dapat mewadahi bentuk kerjasama di bidang pertahanan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bentuk kerjasama yang dilakukan nantinya tidak terbatas

kepada 7 *Experts' Working Groups* (EWGs) yang telah berjalan selama ini, tetapi akan terus dikembangkan berdasarkan kesepakatan atas kepentingan bersama dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, dengan berfokus kepada Keamanan maritim/*Maritim Security*, Kontra Teroris/*Counter-terrorism*, serta Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana/*Humanitarian Assistance and Disaster Relief*. Kerjasama dalam kerangka AOIP di bidang pertahanan diharapkan dapat terus menjaga keamanan di kawasan, selain menjadikan ASEAN semakin bersatu dan menjadi pusat dalam menjembatani berbagai kepentingan terkait bidang keamanan di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama. Sebagai awal dari perwujudannya adalah dengan melibatkan negara-negara diluar ADMM *Plus* yang berada di kawasan Indo-Pasifik untuk terlibat sebagai pengamat dalam setiap kegiatan kerjasama praktis yang dilakukan.

Kerjasama Pertahanan Indo-Pasifik dan Strategi Pertahanan Negara

Kerjasama kongkrit di kawasan Indo-Pasifik adalah selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi PMD, hal ini

disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada kegiatan Dialog tingkat tinggi tentang kerjasama Indo-Pasifik 2019 (Newswire, 2019). 5 pilar utama yang dijadikan sebagai visi maritim Indonesia adalah (i) membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim; (ii) mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa; (iii) memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut; (iv) menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; dan (v) membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim (Neary, 2014).

Dalam penekanan ulang yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan ada 2 hal pokok yang terkait dengan strategi PMD tersebut, yakni memajukan perekonomian maritim Indonesia dan mempertegas identitas

bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, yang kemudian diwujudkan menjadi doktrin keamanan maritim yang mengharuskan Indonesia berdaulat di perairan lautnya sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, laut yang bebas dari pelanggaran hukum, keamanan dan keselamatan pelayaran, serta keamanan dan kelestarian sumber daya maritim.

Strategi pertahanan negara yang berorientasi kepada budaya maritim harus mencakup berbagai upaya yang bersifat *outward looking* dan juga *inward looking*. *Outward looking* adalah terkait dengan kegiatan diplomasi pertahanan maupun diplomasi maritim yang ditujukan selain untuk melakukan kerjasama pertahanan di kawasan, juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian PMD tersebut, diantaranya sengketa perbatasan ataupun berbagai tindakan kriminal di perairan (Kementerian Luar Negeri et al., 2017). Kegiatan-kegiatan diplomasi dilakukan secara bilateral maupun multilateral dengan melibatkan tidak saja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, tetapi juga berbagai Kementerian dan Lembaga lain yang terkait dengan hal tersebut,

diantara Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya (Laksmiana et al., 2018). Bagaimanapun juga semua metoda dan strategi yang digunakan oleh negara dalam kerangka kerjasama internasional, termasuk dalam penyelenggaraan diplomasi pertahanan maritim adalah ditujukan untuk memperoleh kerjasama tidak saja di bidang pertahanan tetapi juga di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa saling percaya (Pedrasan, 2015).

Sementara itu Strategi Pertahanan Negara yang bersifat *inward looking* adalah diarahkan dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat diantaranya adalah penyusunan doktrin pertahanan negara defensif aktif yang berorientasi pada laut, membangun kekuatan angkatan laut dan kekuatan unsur-unsur keamanan laut dan memberdayakan berbagai potensi maritim melalui upaya pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL (Anwar, 2018).

Pembahasan

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

Pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla) adalah merupakan salah satu tugas pokok yang dibebankan kepada TNI AL berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor: 34 tahun 2004 tentang TNI. Pada hakekatnya Dawilhanla ini adalah upaya untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta melalui upaya membangun, memelihara dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Dawilhanla dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut dan membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan laut beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) ataupun Operasi Militer selain Perang (OMSP). Terdapat beberapa objek dari pelaksanaan Dawilhanla, diantaranya adalah Logistik Wilayah, Potensi Demografi, Sarana dan Prasarana dan juga Kondisi Sosial, yang dilakukan melalui Bakti TNI AL, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan juga Komunikasi Sosial.

Sehingga apabila kita pelajari lebih lanjut, terdapat 2 tujuan dalam penyelenggaraan Dawilhanla, yang pertama terkait dengan kepentingan pertahanan negara dan yang kedua adalah dalam perspektif kepentingan masyarakat. Terkait dengan pertahanan

negara, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan dapat dipersiapkan wilayah pertahanan laut dan kekautan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Sementara dalam perspektif kepentingan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meringankan kesejahteraan masyarakat maritim. Kedua tujuan tersebut harus dapat dicapai secara sinergi dan berkesinambungan, oleh karena keduanya berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya dimana laju pertumbuhan perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik tanpa tersedianya lingkungan yang aman, damai dan juga stabil. Hal ini sejalan dengan proyeksi dari PMD maupun AOIP, bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia maupun kawasan Indo-Pasifik, keamanan nasional masing-masing negara di kawasan yang damai dan stabil harus dapat tercipta dan terpelihara.

Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia

Apa saja implementasi kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan

dalam rangka tercapainya visi PMD, terutama dalam menciptakan suatu wilayah maritim yang damai, aman dan stabil. Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya dari pihak TNI untuk turut serta dalam mengatasi berbagai isu permasalahan laut di Indonesia, baik yang berdampak kepada faktor geografis dalam pengelolaan kekayaan laut yang berkesinambungan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maritim, ataupun pemantauan kondisi keamanan di wilayah sekitar.

Berbagai isu-isu permasalahan laut yang terkait dengan pengelolaan kekayaan laut antara lain adalah eksploitasi laut yang berlebihan dan menggunakan cara yang destruktif, perusakan wilayah lepas pantai dan dasar laut, serta pembuangan limbah keluarga dan produksi yang bermuara ataupun di wilayah laut. Berbagai permasalahan tersebut adalah merupakan salah satu ancaman nirmiliter yang harus diatasi dan dihadapi oleh K/L terkait beserta pemerintah daerah, dengan TNI memberikan dukungan dari belakang. Metoda kegiatan Dawilhanla yang dilakukan dapat menggunakan ketiga metoda yang ada, seperti Bakti TNI AL dengan melakukan upaya pemeliharaan wilayah pesisir dan pantai dan mengatasi permasalahan limbah

sampah. Sementara pembinaan ketahanan wilayah dan komunikasi sosial dilaksanakan secara sinergi dengan K/L dan pemda dalam meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan berbagai peraturan yang ada dikaitkan dengan kesinambungan hayati yang akan menjaga kelangsungan ekonomi dari masyarakat pesisir pantai tersebut.

Sementara itu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat maritim terutamanya adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah. Pembinaan yang dilakukan tidak saja berupaya untuk meningkatkan upaya bela negara dari seluruh masyarakat maritim untuk menangkal setiap potensi ancaman keamanan maritim, tetapi juga diarahkan dengan menumbuhkan budaya dan jiwa maritim di setiap lapisan masyarakat. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran bela negara akan berdampak kepada menurunnya ancaman keamanan dari perusakan pantai, perompakan di laut, ataupun penyeludupan melalui laut yang menjadikan kawasan maritim tidak aman untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu menumbuhkan budaya dan jiwa maritim akan berdampak kepada upaya yang

maksimal, dengan cara yang sesuai aturan, untuk melakukan pengelolaan hasil kekayaan laut yang berlimpah.

Kegiatan pemantauan terhadap kondisi keamanan di kawasan sekitar dapat dilakukan secara langsung melalui peninjauan berkala ke daerah-daerah binaan, ataupun secara tidak langsung melalui pemantauan atas jaring yang dibangun, melalui kegiatan komunikasi sosial ataupun pembinaan ketahanan wilayah. Kegiatan ini harus dilaksanakan sepanjang waktu, terutama untuk mengantisipasi waktu kegiatan para nelayan yang terkadang berlawanan dengan waktu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lain. Hal ini harus dilakukan, karena aksi kriminalitas di laut selalu bermula dari wilayah daratan, terutama di wilayah pesisir dan sepanjang garis perairan lainnya.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disampaikan diatas kita mendapatkan kesimpulan bahwa Poros Maritim Dunia yang menjadi visi pembangunan dari Presiden Joko Widodo, yang juga telah dijadikan muara bagi kesepakatan ASEAN *Outlook on Indo-Pacific*, menekankan kepada dua faktor kerjasama dan pembangunan

yang harus dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Kedua faktor tersebut adalah bidang Ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di dalamnya, serta bidang keamanan tidak saja pada lingkup nasional tetapi juga pada lingkup regional Indo-Pasifik. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dapat digunakan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh TNI, terutamanya TNI AL, untuk berperan serta secara aktif untuk mensukseskan pencapaian visi PMD ataupun AOIP. Pemberdayaan wilayah pertahanan laut dapat mensinergikan tujuan di bidang keamanan wilayah dan juga ekonomi dengan komprehensif dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 3 macam metoda yang ada. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bagi para pihak yang terkait, terutama di jajaran TNI AL, untuk dapat menyusun suatu strategi yang tepat, serta berhasil guna yang efektif dan efisien. Hal ini diperlukan agar pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang dilakukan dapat menjadi salah satu cara yang jitu dalam mendukung tercapainya visi PMD maupun AOIP.

Banyak program kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh TNI ataupun unsur di jajaran Kementerian Pertahanan dalam mendukung pencapaian visi PMD maupun AOIP, sehingga penelitian lebih lanjut perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dapat dilakukan adalah dalam penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan ataupun kerjasama internasional di bidang pertahanan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Al Syahrin, M. N. "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia". *Indonesian Perspective*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1–17.
- Anwar, D. F. "Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific", *International Affairs Journal*, Vol. 96, No. 1, 2020, hlm. 111–129.
- Anwar, S. "Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 69–90.
- Auliya, P., & Sulaiman, Y. "Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritime Fulcrum", *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 79–90.
- Buzan, B., & Waeber, O. *Regions and Powers: The Structure of International Security* (edisi ebook). (New York: Cambridge University Press, 2003) hlm. 6-20.

- Damayanti, A. "Indo-Pacific Connectivity : Toward Competition or Cooperation?", *Asian Studies International Journal*, Vol. 1, No. 1, 2019, 1–7.
- Helaluddin. "Mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi: sebuah penelitian kualitatif", dalam https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif, 15 Maret 2018, diakses pada 20 Februari 2021.
- Kemlu & CSIS Indonesia. *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan dan Prospek*. (Jakarta : CSIS dan Pusat P2K-OI Kemenlu, 2017). hlm 47-50.
- Laksmiana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. (Jakarta : CSIS, 2018), hlm. 2-36.
- Natalegawa, M. "an Indonesian Perspective on the Indo-Pacific" dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/an-indonesian-perspective-indo-pacific.html>, 20 Mei 2013, diakses pada 20 Maret 2021.
- Neary, A. "Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus"", *Southeast Asia from Scott Circle Journal*, Vol. 5, No. 24, 2014, hlm. 1–16.
- Newswire. "Menlu : Kerja Sama Indo-Pasifik Selaras dengan Poros Maritim Kita", dalam [https://kabar24.bisnis.com/read/20190320/15/902136/menlu-kerja-sama-indo-pasifik-selaras-dengan-poros-](https://kabar24.bisnis.com/read/20190320/15/902136/menlu-kerja-sama-indo-pasifik-selaras-dengan-poros-maritim-kita)
- maritim-kita, 20 Maret 2019, diakses pada 15 Februari 2021.
- Pedrasan, R. *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community? (Muenchen : Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Institut Für Politische Wissenschaft. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2015)*, hlm. 227-233.
- Sukmadewi, P. "Indo-Pacific Treaty sebagai Perluasan Kerjasama Indonesia di Bidang Maritim", dalam https://www.researchgate.net/publication/343684978_INDOPACIFIC_TREATY_SEBAGAI_PERLUASAN_KERJA_SAMA_INDONESIA_DI_BIDANG_MARITIM, Agustus 2020, diakses pada 20 Februari 2021.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 25–51.
- Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. "Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia", *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 41–70.